

**PENERAPAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS
PENDAPATAN PENGEOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh :

Julie Abdullah

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

e-mail : abdullah.julie@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the application of the assessment of inventory on the revenue office in financial management and asset area (DPPKAD) bone bolango district.

Analysis method used to prove a hypothesis that is quantitative descriptive method is described and compare the assessment of inventory applied by the revenue department financial management and asset an area with treatment based on a statement the government accounting standards number 05.

The results of research shows in the assessment of inventory , the government accounting standard statement stressed the use of a method of perpetual number 05 in records and manage supply means recording supplies done every happened transactions that affect supplies , so that the balance of supply will show the balance of the truth .In a method of perpetual the assessment of supplies can be a systematic method of using a method of fifo (first in first out) or using a method of moving average.

Keywords : inventory, first in first out

PENDAHULUAN

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05 bertujuan untuk mengatur perlakuan dan metode pencatatan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian ditekankan menggunakan metode perpetual dalam perlakuan akuntansi persediaan. Metode perpetual yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan, maka saldo persediaan akan menunjukkan saldo yang sebenarnya.

Persediaan dalam pemerintah dapat meliputi: barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis / tujuan berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses / setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Cara menilai perlakuan akuntansi persediaan menggunakan metode sistematis seperti FIFO (*First In First Out*/masuk pertama keluar pertama) atau rata-rata tertimbang serta menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Jika menggunakan metode FIFO, penentuan persediaan pada akhir periode yang mengasumsikan bahwa barang-barang yang lebih dulu dibeli akan digunakan terlebih dulu, dan barang-barang yang berasal dari pembelian terakhir diasumsikan akan menjadi persediaan akhir pada periode yang

bersangkutan. Sedangkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) yaitu rata-rata hitung yang diperoleh dengan mengalikan masing-masing nilai dengan nilai frekuensi atau persennya.

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan daerah. Dinas ini dalam pencatatan persediaan masih menggunakan pencatatan *single entry* atau sering disebut dengan sistem pencatatan tata buku tunggal.

Dalam sistem pencatatan ini kita hanya melakukan pencatatan satu kali sehingga memiliki kelemahan antara lain kurang baik untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Maka dari itu, keadaan nilai persediaan pada akhir periode yang tercantum dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Bone Bolango hanya melalui inventarisasi fisik berdasarkan buku persediaan yang dibuat oleh bendahara barang.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka penelitian yang diangkat adalah :“Penerapan Metode Penilaian Persediaan Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diangkat masalah pokok yaitu “Bagaimana penerapan penilaian persediaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bone Bolango?”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penilaian persediaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bone Bolango.

TINJUAN PUSTAKA

Akuntansi keuangan daerah

Menurut Halim, (2008, Hal 42) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah – pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); badan pengawas keuangan; investor, kreditur, dan donator; analis ekonomi dan pemerhati pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Persediaan

Menurut Ismaya (2006, 515) persediaan merupakan semua persediaan barang yang menjadi milik perusahaan yang meliputi bahan olahan, bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi dan segala perlengkapannya. Kemudian Suharli (2006, 227) mengatakan persediaan barang dagang adalah barang yang dibeli untuk dijual lagi sebagai aktivitas utama perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 14 tentang persediaan (IAI, 2004), persediaan adalah aktiva : 1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 2) dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, 3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Penilaian Persediaan Berdasarkan Standar Akuntansi Persediaan Pernyataan No. 05 Tahun 2010

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 05 Paragraf 17 tahun 2010 mengatakan Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan :

- a. Metode sistematis seperti FIFO (*First In First Out*) atau rata-rata tertimbang

FIFO (*First In First Out*)

Jika menggunakan metode FIFO, penentuan persediaan pada akhir periode yang mengasumsikan bahwa barang-barang yang lebih dulu dibeli akan digunakan terlebih dulu, dan barang-barang yang berasal dari pembelian terakhir diasumsikan akan menjadi persediaan akhir pada periode yang bersangkutan.

Rata-rata tertimbang

Sedangkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) yaitu rata-rata hitung atau rata-rata bergerak, diperoleh dengan mengalikan masing-masing nilai dengan nilai frekuensi atau persennya. Setiap pembelian menghasilkan harga pokok yang baru, yaitu dengan cara membagi jumlah rupiah persediaan dengan unit yang tersisa.

Pencatatan Persediaan

Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur akuntansi persediaan dalam pernyataan no. 5 menekankan bahwa dalam mencatat pengadaan persediaan, pemerintah harus menggunakan metodeperpetual yang berarti pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan, maka saldo persediaan akan menunjukkan saldo yang sebenarnya.

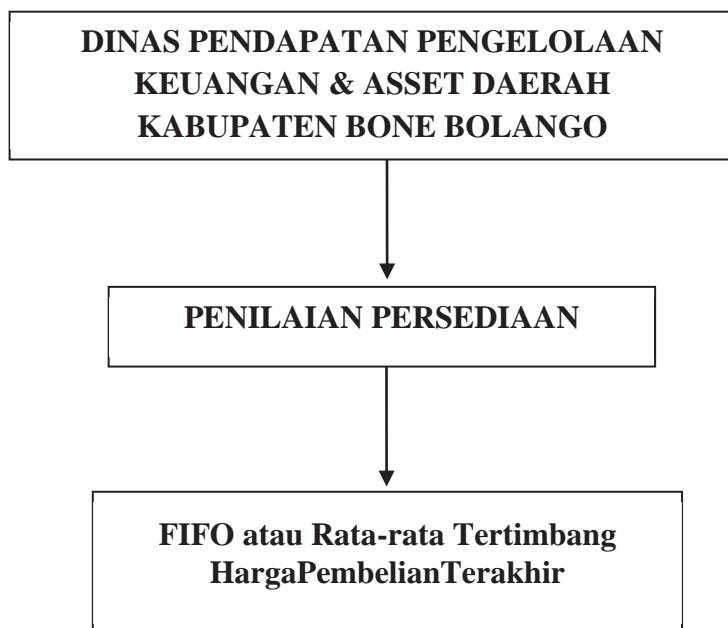
Pelaporan dan Pengungkapan

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05 mengatakan disamping penyajian diatas hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- Kondisi persediaan; Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan kajian teoritis di atas, maka konstelasi dalam penelitian digambarkan sebagai berikut :

Gambar : Alur Kerangka Konseptual



Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yaitu Metode deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan dan membandingkan penilaian persediaan yang diterapkan oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan perlakuan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 5 tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05 tahun 2010 mengakui Persediaan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepengusaannya.

4. Kecamatan Suwawa Selatan
5. Kecamatan Kabila
6. Kecamatan Tilongkabila
7. Kecamatan Tapa
8. Kecamatan Bulango Utara
9. Kecamatan Bulango Selatan
10. Kecamatan Bulango Timur
11. Kecamatan Bulango Ulu
12. Kecamatan Botupingge
13. Kecamatan Kabila Bone
14. Kecamatan Bonepantai
15. Kecamatan Bulawa
16. Kecamatan Bone Raya
17. Kecamatan Bone

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebagian besar wilayah Bone Bolango (48,65%) terletak pada ketinggian antara 100 – 500 meter diatas permukaan laut, terletak antara 0,27’ – 1.01’ Lintang Utara dan antara 121.23’ – 122.44’ Bujur Timur, luas wilayahnya 1.984,58 Km² atau 16.24 % dari total luas Provinsi Gorontalo dan secara administrasi Kabupaten Bone Bolango pada tahun ini dibagi dalam 17 (tujuh belas) Kecamatan Definitif, sebagai berikut :

1. Kecamatan Suwawa
2. Kecamatan Suwawa Tengah
3. Kecamatan Suwawa Timur

Deskripsi Variabel Penelitian

Persediaan dalam kegiatan operasional pemerintah pada umumnya merupakan barang habis pakai yang terdiri dari kertas, materai, pulpen tipe-ex dan lain-lain yang dikelompokkan pada alt tulis kantor yang dimanadiperlukan suatu pengelolaan dan pertanggungjawabannya yang serius walupun nilainya tidak terlalu besar. Pengelolaan dan pencatatan persediaan selama ini diberbagai instansi pemerintah belum mempunyai acuan yang baku, sehingga masih beragam antar metode dan cara pencatatan yang digunakan. Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango belum melakukan suatu perhitungan dengan tepat akan persediaan yang dimiliki oleh instansi tersebut hanya

diakumulasikan dalam satu rekening yaitu alat tulis kantor.

Walupun pihak DPPKAD Kab. Bone Bolango menyatukan dalam bentuk satu rekening semua persediaan, tapi peneliti mendapatkan data salah satu persediaan yang

dimiliki oleh instansi DPPKAD Kab. Bone Bolango secara wawancara.

Berikut ini disajikan transaksi pembelian dan pemakaian persediaan yang dikhususkan pada kertas HVS di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango,

Tabel 1 :Daftar Pembelian dan Penggunaan Persediaan Kerta HVS Tahun 2010				
Tgl / bulan	Kuantitas	Satuan	Jumlah	Penggunaan
01-Jan	19	Rp 30.000	Rp 570.000	
10-Jan				6
20-Jan				4
02-Feb	33	Rp 30.000	Rp 990.000	
15-Feb				27
13-Mar	25	Rp 32.000	Rp 800.000	
28-Mar				25
21-Apr	32	Rp 31.500	Rp 1.008.000	
10-Mei				19
01-Jun				21
13-Jun	27	Rp 30.500	Rp 823.500	
15-Agust	25	Rp 32.000	Rp 800.000	
28-Agust				35
06-Okt	35	Rp 30.000	Rp 1.050.000	
10-Okt				15
25-Okt				20
01-Nop	38	Rp 31.750	Rp 1.206.500	
17-Nop				17
10-Des	25	Rp 32.500	Rp 812.500	
Total	259		Rp 8.060.500	189
Sumber : DPPKAD Kab. Bone Bolango				

kemudian perlakuannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintah No. 05. dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, persediaan kertas HVS pada tahun 2010 berfluktuasi baik dilihat pada kuantitas pembelian maupun dari penggunaannya. Pada tahun 2010 jumlah kuantitas yang dibeli sebanyak 259 rim kertas, sedangkan penggunaannya berjumlah 189 rim kertas. Pada tahun 2010 juga dari 259 rim kertas yang dibeli bernilai Rp. 8.060.500. sehingga dapat diketahui pada akhir tahun 2010 kuantitas persediaan kertas HVS berjumlah 70 rim (259 rim – 189 rim).

a) Standar Akuntansi Pemerintah Nomor Pernyataan No. 05 memperlakukan persediaan berdasarkan metode perpetual

Sepertiyang sudah dikemukakan sebelumnya, pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk

menyempurnakan peraturan sebelumnya dalam pelaporan keuangan. Akuntansi persediaan tidak luput pula diatur dalam peraturan ini dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05.

Dalam perlakuan persediaan, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05 menekankan penggunaan metode perpetual dalam mencatat dan mengelola persediaan yang berarti pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan, sehingga saldo persediaan akan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Dalam metode perpetual penilaian persediaan dapat menggunakan metode sistematis berupa metode FIFO (*First In First Out*) atau menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Selanjutnya untuk keperluan pelaporan dan pengungkapan, hasil inventarsasi fisik persediaan tersebut akan disajikan kedalam neraca dengan

akun lawan cadangan persediaan yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Kedua akun tersebut disajikan dengan jumlah yang sama (self balancing).

Selanjutnya, untuk memperoleh data pemakaian kertas yang akurat serta untuk mengetahui saldo persediaan kertas yang sebenarnya sesuai Pernyataan Standar Akuntansi No. 05, maka penilaian persediaan menggunakan dua metode sistematis seperti FIFO (*First In First Out*) atau menggunakan metode rata-rata tertimbang

- **FIFO (*First In First Out*)**

Metode FIFO (*First In First Out*) dalam penentuan persediaan pada akhir periode mengasumsikan bahwa barang-barang yang lebih dulu dibeli akan digunakan terlebih dulu dan barang-barang yang berasal dari pembelian terakhir diasumsikan akan menjadi persediaan akhir pada periode yang bersangkutan. Dengan menggunakan data pembelian dan pemakaian kertas HVS diatas, maka kartu persediaan yang perlu dibuat berdasarkan metode FIFO akan disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut

**Tabel 2 : Kartu Persediaan Kertas HVS
Metode FIFO
Tahun 2010**

Tgl	Masuk			Keluar			Saldo		
	Unit	Satuan	Jumlah	Unit	Satuan	Jumlah	Unit	Satuan	Jumlah
01-Jan	19	Rp 30.000	Rp 570.000				19	Rp30.000	Rp 570.000
10-Jan				6	Rp 30.000	Rp 180.000	13	Rp30.000	Rp 390.000
20-Jan				4	Rp 30.000	Rp 120.000	9	Rp30.000	Rp 270.000
02-Feb	33	Rp 30.000	Rp 990.000				9	Rp30.000	Rp 270.000
							33	Rp30.000	Rp 990.000
15-Feb				9	Rp 30.000	Rp 270.000	15	Rp30.000	Rp 450.000
				18	Rp 30.000	Rp 540.000			
13-Mar	25	Rp 32.000	Rp 800.000				15	Rp30.000	Rp 450.000
							25	Rp32.000	Rp 800.000
28-Mar				15	Rp 30.000	Rp 450.000	15	Rp32.000	Rp 480.000
				10	Rp 32.000	Rp 320.000			
21-Apr	32	Rp 31.500	Rp 1.008.000				15	Rp32.000	Rp 480.000
							32	Rp31.500	Rp 1.008.000
10-Mei				15	Rp 32.000	Rp 480.000	28	Rp31.500	Rp 882.000
				4	Rp 31.500	Rp 126.000			
01-Jun				21	Rp 31.500	Rp 661.500	7	Rp31.500	Rp 220.500
13-Jun	27	Rp 30.500	Rp 823.500				7	Rp31.500	Rp 220.500
							27	Rp30.500	Rp 823.500
15-Agust	25	Rp 32.000	Rp 800.000				7	Rp31.500	Rp 220.500
							27	Rp30.500	Rp 823.500
							25	Rp32.000	Rp 800.000
28-Agust				7	Rp 31.500	Rp 220.500	24	Rp32.000	Rp 768.000
				27	Rp 30.500	Rp 823.500			
				1	Rp 32.000	Rp 32.000			
06-Okt	35	Rp 30.000	Rp 1.050.000				24	Rp32.000	Rp 768.000
							35	Rp30.000	Rp 1.050.000
10-Okt				15	Rp 32.000	Rp 480.000	9	Rp32.000	Rp 288.000
							35	Rp30.000	Rp 1.050.000
25-Okt				9	Rp 32.000	Rp 288.000	24	Rp30.000	Rp 720.000
				11	Rp 30.000	Rp 330.000			
01-Nop	38	Rp 31.750	Rp 1.206.500				24	Rp30.000	Rp 720.000
							38	Rp31.750	Rp 1.206.500
17-Nop				17	Rp 30.000	Rp 510.000	7	Rp30.000	Rp 210.000
							38	Rp31.750	Rp 1.206.500
10-Des	25	Rp 32.500	Rp 812.500				7	Rp30.000	Rp 210.000
							38	Rp31.750	Rp 1.206.500
							25	Rp32.500	Rp 812.500
Jumlah							70		Rp2.229.000

Sumber : Data diolah

Dari hasil olah data diatas dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*), maka terlihat jelas pemakaian kertas HVS serta jumlah saldo persediaan diakhir periode yaitu tersisa sebanyak 70rim dengan total sebesar Rp 2.229.000

- Metode Rata-Rata Bergerak
Pada metode ini nilai persediaan kertas HVS yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kab Bone Bolango, dilakukan analisisnya berbeda dengan metode FIFO. Adapun perhitungan persediaan kertas HVS dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 : Kartu Persediaan Kertas HVS									
Metode Rata-Rata Bergerak									
Tahun 2010									
Tgl	Masuk			Keluar			Saldo		
	Unit	Satuan	Jumlah	Unit	Satuan	Jumlah	Unit	Satuan	Jumlah
01-Jan	19	Rp 30.000	Rp 570.000				19	Rp 30.000	Rp 570.000
10-Jan				6	Rp 30.000	Rp 180.000	13	Rp 30.000	Rp 390.000
20-Jan				4	Rp 30.000	Rp 120.000	9	Rp 30.000	Rp 270.000
02-Feb	33	Rp 30.000	Rp 990.000				42	Rp 30.000	Rp 1.260.000
15-Feb				27	Rp 30.000	Rp 810.000	15	Rp 30.000	Rp 450.000
13-Mar	25	Rp 32.000	Rp 800.000				40	Rp 31.250	Rp 1.250.000
28-Mar				25	Rp 31.250	Rp 781.250	15	Rp 31.250	Rp 468.750
21-Apr	32	Rp 31.500	Rp 1.008.000				47	Rp 31.420	Rp 1.476.750
10-Mei				19	Rp 31.420	Rp 596.984	28	Rp 31.420	Rp 879.766
01-Jun				21	Rp 31.420	Rp 659.824	7	Rp 31.420	Rp 219.941
13-Jun	27	Rp 30.500	Rp 823.500				34	Rp 30.689	Rp 1.043.441
15-Agust	25	Rp 32.000	Rp 800.000				59	Rp 31.245	Rp 1.843.441
28-Agust				35	Rp 31.245	Rp 1.093.567	24	Rp 31.245	Rp 749.875
06-Okt	35	Rp 30.000	Rp 1.050.000				59	Rp 30.506	Rp 1.799.875
10-Okt				15	Rp 30.506	Rp 457.595	44	Rp 30.506	Rp 1.342.279
25-Okt				20	Rp 30.506	Rp 610.127	24	Rp 30.506	Rp 732.152
01-Nop	38	Rp 31.750	Rp 1.206.500				62	Rp 31.269	Rp 1.938.652
17-Nop				17	Rp 31.269	Rp 531.566	45	Rp 31.269	Rp 1.407.086
10-Des	25	Rp 32.500	Rp 812.500				70	Rp 31.708	Rp 2.219.586
Sumber : Data diolah									

Dari perhitungan diatas dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, bahwa dapat diketahui dari sisa persediaan kertas HVS yang berjumlah 70 rim dengan menggunakan metode bernilai Rp. 2.219.586

PEMBAHASAN

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05 sama-sama mengakui Persediaan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepengusaannya. Selanjutnya persediaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diukur dari biaya perolehan yaitu harga pembelian tanpa meliputi biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Namun menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05 persediaan diukur

Balanced : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Dalam penilaian persediaan, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05 menekankan penggunaan metode perpetual dalam mencatat dan mengelola persediaan yang berarti pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan, sehingga saldo persediaan akan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Dalam metode perpetual penilaian persediaan dapat menggunakan metode sistematis berupa metode FIFO (*First In First Out*) atau menggunakan metode rata-rata bergerak.

Metode FIFO (*First In First Out*) dalam penentuan persediaan pada akhir periode mengasumsikan bahwa barang-barang yang lebih dulu dibeli akan digunakan terlebih dulu dan barang-barang yang berasal dari pembelian terakhir diasumsikan akan menjadi persediaan akhir pada periode yang bersangkutan. Setelah menilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) maka terlihat jelas pemakaian kertas HVS serta jumlah saldo persediaan diakhir periode yaitu metode inintersisa sebanyak 70rim kertas HVS dengan nilai sisa persediaan sebesar Rp 2.229.000

Sedangkan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak nilai persediaan setiap ada penambahan atas pembelian kertas HVS akan membentuk harga perolehan yang baru, sehingga tidak mengikuti harga perolehan yang baru atau pun harga perolehan yang lama. Sehingga pada akhir periode tahun 2010 sisa persediaan kertas HVS sebanyak 70 rim bernilai Rp. 2.219.586

Dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti, berdasarkan hasil diatas yakni perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bone Bolango belum diterapkan sesuai Standar Akuntansi Persediaan Pernyataan No.

SIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bone Bolango maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bone Bolango mencatat persediaan hanya menggunakan satu rekening saja yaitu alat tulis kantor. Akan tetapi persediaan alat tulis kantor mencakup kertas HVS, pulpen, materai. Yang kesmuanya itu harus dbuatkan suatu kartu persediaan dan metode penilaian yang terpisah sehingga dapat diketahui secara satu per satu nilai persediaannya masing-masing.

2. Berdasarkan hasil penilaian persediaan pada salah satu persediaan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango yaitu kertas HVS dengan menggunakan sistem perpetual dalam hal ini menggunakan metode FIFO dan metode Rata-Rata Bergerak, bahwa sisa persediaan kertas HVS yang dimiliki sebanyak 70 rim. dan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO berjumlah Rp 2.229.000 sedangkan menggunakan metode rata-rata bergerak berjumlah Rp. 2.219.586.
3. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05

SARAN

1. Sebaiknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bone Bolango dalam mengelola persediaan menggunakan metode perpetual mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05 dengan pencatatan transaksi menggunakan sistem *double entry*, agar pergerakan pemakaian persediaan dapat terlihat jelas serta saldo persediaan akan menunjukkan saldo yang sebenarnya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta akuntabel.
2. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu sejak bulan Oktober 2010 dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas dan berlaku sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015. Namun Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual masih dapat diterapkan oleh setiap entitas selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, akan tetapi basis ini tidak berlaku mulai tahun anggaran 2015. Maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bone Bolangomasih memiliki waktu untuk memperbaiki cara mengelola pemakaian persediaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 05.
3. Untuk periode-periode selanjutnya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bone Bolango lebih teliti dan maksimal dalam mengelola persediaannya untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. BPFE: Yogyakarta.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE: Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. **Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU**. PT. Indeks, Jakarta Barat
- Gade, Mohammad. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, LPFE: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Salemba Empat, Jakarta
- IKAPI. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No. 71 Tahun 2010)*, Fokus Media: Bandung.
- Insukirno. 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah Cetakan Kedua*. Alfabeta, Bandung.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba, Jakarta.
- KSAP. 2010. *Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP-05*.
- Suharli, Michell.2006. *Akuntansi Untuk bisnis jasa dan dagang*.Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tanjung, Abdul. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah (Konsep dan Aplikasi)*, Alfabeta: Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
..... Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Puhi, Sutriska. 2011. *Analisis Pencatatan Persediaan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 Tahun 2006 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
..... Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.